

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang lazim dipergunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi sangat penting dan dibutuhkan, sebab tanpa pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan selanjutnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai

proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Eva, 2013).

Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang (Boediono, 1981:2).

Menurut Lincoln Arsyad (2004), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Menurut Tambunan (2001) pertumbuhan ekonomi adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berarti penambahan Pendapatan Nasional (PN).

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produksi dari perekonomian secara komprehensif dan terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu, sehingga menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin lama semakin besar (Todaro, 2000). Pertumbuhan ekonomi menurut Suparmoko (1998) merupakan salah satu tujuan penting dari kebijakan ekonomi makro yang berkaitan ukuran fisik berupa peningkatan produksi barang dan jasa.

Salah satu cara untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi adalah melalui penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan cara membandingkan gross national product (GNP) tahun yang sedang berjalan dengan GNP tahun sebelumnya.

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah atau provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB akan memberi suatu gambaran bagaimana kemampuan daerah dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang ada.

Data PDRB yang dipublikasikan terdiri dari data PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar -4,89%, tetapi jauh lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional sekitar -13%. Sejak tahun 1999 perekonomian sudah mulai membaik dengan pertumbuhan sebesar 1,59%, pada tahun 2000 menurun sebesar -1,07% dan pada tahun 2001 sebesar 3,66%. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat sejak periode 2001 - 2011 cenderung meningkat. Hal ini berkemungkinan dipengaruhi oleh perubahan konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah yang juga cenderung mengalami peningkatan.

Sepanjang tahun 2008-2011 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi 4,28%. Melambatnya pertumbuhan ekonomi ini merupakan dampak gempa yang terjadi di tahun 2009 pada sendi

perekonomian Sumatera Barat. Pasca bencana gempa 2009 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat meningkat tajam. Pada 2010 tercatat 5,93%, naik dari tahun sebelumnya 4,28%. Kondisi ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2011 menunjukkan perkembangan lebih baik dengan pertumbuhan yang terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun pada triwulan laporan laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, namun secara keseluruhan tahun, kinerja ekonomi Sumatera Barat memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dari semula tumbuh 5,93% menjadi 6,22%.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi sepanjang tahun 1997-2011 terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 8,24% dan yang terendah terjadi pada tahun 1998 yang disebabkan karena krisis ekonomi yaitu sebesar -4,89%.

Sumatera Barat memiliki 12 Kabupaten dan 7 kota dimana Kota Padang merupakan kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi sedangkan yang terendah di tempati oleh kota Padang Panjang. Kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di Kabupaten Agam dan yang terendah di Kabupaten Pasaman. Pada tahun 2012 Kabupaten Agam masuk ke dalam peringkat kabupaten/kota terkaya di Indonesia, Agam menduduki peringkat 37, sedangkan peringkat 1 adalah Kabupaten Kutai versi warta ekonomi.

Rata – rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam dari tahun 1997 – 2011 adalah 4,10% sedangkan Kabupaten Pasaman hanya sebesar 4,06%. Tetapi Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman lebih tinggi yaitu sebesar 6,15% dan Kabupaten Agam sebesar 5,94%.

Pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam turun menjadi -4,11% karena krisis ekonomi namun masih lebih baik dibandingkan dengan

pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar -6,78%. Setelah itu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam meningkat setiap tahun namun pada tahun 2001 terjadi penurunan menjadi 3,40% dari tahun 2000 sebesar 3,55 %. Setelah itu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam meningkat setiap tahun sampai tahun 2008, pada tahun 2009 turun menjadi 4,92% dari tahun 2008 sebesar 6,35%. Hal ini dikarenakan adanya kejadian bencana gempa bumi 2009. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 6,37% dan yang terendah terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar -4,11 lalu meningkat menjadi 1,48% pada tahun 1999.

Begitu juga dengan Kabupaten Pasaman pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi kabupaten ini mengalami penurunan menjadi -3,19% dan mengalami peningkatan pada tahun 1999 sebesar 1,50%. Pada tahun 2000 perekonomian Kabupaten Pasaman sudah mulai menunjukkan pemulihan dari krisis dimana pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 3,03%. Setelah itu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 6,15% dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 1998 dimana terjadinya krisis ekonomi yaitu sebesar -3,19%.

Dalam teori Solow dijelaskan bahwa investasi dan tabungan, penduduk serta teknologi berpengaruh terhadap tingkat output perekonomian dan pertumbuhannya.

Fungsi - fungsi yang diemban pemerintah dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal yang salah satu penekanannya melalui kebijakan pengeluaran/belanja pemerintah. Kebijakan belanja pemerintah diyakini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Didalam teori pertumbuhan endogen, pengeluaran pemerintah memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi dengan asumsi implikasi

pengeluaran pemerintah adalah untuk kegiatan produktif misalnya belanja infrastruktur. Belanja yang bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik akan dapat mendorong perekonomian (Anggreani, 2012). Misalnya, pembangunan infrastruktur akan mendorong investasi, dengan adanya investasi ekonomi akan berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan menyerap pengangguran .

Penanaman modal yang bersumber dari masyarakat dapat berupa investasi swasta ataupun investasi dari pihak asing, sementara penanaman modal yang bersumber dari pemerintah dinamakan belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual (Abdullah, 2008).

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 2001 berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran pemerintah daerah. Sebelumnya penentuan alokasi ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan mengacu pada realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan sedikit peningkatan (incremental) tanpa merubah jenis atau pos belanja (line-item). Peraturan Pemerintah (PP) No. 105/2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 22/1999 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah.

“Pemerintah daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD. Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politik. Adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif menyebabkan alokasi belanja modal sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat” (Keefer dan Khemani, 2003).

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Konsep multi-term expenditure framework (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (usefulness) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (budget capability) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001).

Menurut Abdul Halim (2002:72) “Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menanamkan aset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin, seperti biaya operasi dan biaya pemeliharaan”. Belanja modal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini menyimpulkan bahwa belanja modal itu sangat penting karena membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal berbeda dengan belanja-belanja lainnya dalam hal pembuatan keputusan. Anggaran belanja modal, terutama

infrastruktur sangat tergantung pada masukan dari insinyur, arsitek, dan perencanaan. Belanja modal pada umumnya berasal dari dana bantuan (fund) dan anggaran belanja modal untuk beberapa periode atau tahun anggaran (Bland dan Nunn, 1992).

Pertumbuhan penduduk secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Beberapa pakar menjelaskan bahwa jumlah penduduk suatu negara tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu besar, yaitu harus seimbang dengan jumlah sumber-sumber ekonomi atau yang dikenal dengan Teori Penduduk Optimum. Pengaruh pertumbuhan populasi terhadap pertumbuhan ekonomi masih menjadi perdebatan. Hal ini didasarkan adanya beberapa negara pertumbuhan ekonominya di dorong oleh pertumbuhan penduduknya seperti negara-negara di Eropa barat, beberapa Negara di Afrika, dan Amerika Latin dimana pertumbuhan penduduknya mendorong pertumbuhan dan pembangunan. Berbeda halnya dengan sebagian besar negara-negara di Asia seperti Bangladesh, India atau bahkan negara kita pertumbuhan penduduknya berpotensi menghambat pertumbuhan dan pembangunan.

Pertumbuhan populasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, Adam Smith dalam bukunya "Wealth of Nation" memiliki alasan dengan bertambahnya jumlah penduduk maka tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menumbuhkan perekonomian akan mudah didapatkan dan dengan bertambahnya penduduk akan memperluas pangsa pasar sehingga permintaan terhadap produk meningkat yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun Malthus dan Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan populasi justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi dengan alasan jika perekonomian tidak mampu menyediakan kesempatan kerja bagi

angkatan kerja, maka mereka justru akan menjadi pengangguran dan menjadi beban perekonomian, dan selanjutnya justru akan memperkecil pendapatan perkapita.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi, secara langsung telah menimbulkan kesulitan kepada negara berkembang untuk mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Telah ditunjukkan bahwa diantara negara tersebut ada yang mengalami perkembangan Produk Domestik Bruto yang cukup tinggi. Di samping itu tingkat pendapatan perkapita tidak menunjukkan gambaran yang terlalu mengembirakan. Perbedaan yang besar antara tingkat pertumbuhan Produksi Domestik Bruto dan tingkat pertambahan pendapatan perkapita disebabkan oleh tingkat perkembangan penduduk yang sangat tinggi. Sebenarnya, hal tersebut tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan. Adapun kemampuan itu sendiri lebih lanjut dipengaruhi oleh tingkat jenis akumulasi modal dan tersedianya input atau faktor-faktor penunjang.

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Studi yang dilakukan oleh ekonom Arthur Okun mengindikasikan hubungan negatif antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. Ketika perekonomian tumbuh, berarti terdapat pertumbuhan produksi barang dan jasa. Ketika hal ini terjadi maka kebutuhan akan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa pun akan tumbuh.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Belanja Modal, Pengangguran, dan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa jauh pengaruh belanja modal, pengangguran dan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh belanja modal, pengangguran dan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai informasi dan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman maupun pemerintah Provinsi Sumatera Barat,

sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut tentang masalah pertumbuhan ekonomi.

2. Menambah, melengkapi sekaligus pembandingan hasil-hasil penelitian yang sudah ada menyangkut topik yang sama.
3. Untuk referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya.

1.5. Hipotesis

1. Diduga belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.
2. Diduga Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.
3. Diduga penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, hipotesa dan sistematika penulisan dari masing-masing bab yang merupakan uraian singkat dari isi penelitian ini.

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang kerangka teori dan kemudian pandangan-pandangan Adam Smith, Robert Solow, Rostow dan Musgrave, Peacock dan Wiseman, Keynes, dan Okun secara teoritis, serta penelitian sebelumnya yang telah dilakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, variabel dan pengukuran yang digunakan, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman, dalam hal ini mencakup variabel-variabel yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi antara lain belanja modal, pengangguran, dan penduduk.

BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan serta implikasi kebijakan dari penelitian yang dilakukan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan yang dapat diambil terhadap analisis yang telah dilakukan serta saran berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara (Tarigan, 2013). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas